



Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

Dina Pidjer^{1*}, Manuel A. Todingbua², Since Erna Lamba³

^{1,2,3})Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail: pidjerdina69@gmail.com

Penulis korespondensi

Submitted: 17-02-2025	Review: 27-02-2025	Revision: 04-03-2025	Accepted: 15-03-2025
-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dengan pendekatan mixed methods. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran, sedangkan metode kualitatif menganalisis realisasi dan faktor penghambat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lima informan utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan cukup baik, namun efektivitasnya masih di bawah 100%, mengindikasikan adanya tantangan dalam pemanfaatan dana. Kendala utama meliputi birokrasi yang kompleks, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya pemahaman prosedur anggaran di tingkat sekolah.

Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan kapasitas pegawai, penerapan sistem informasi anggaran yang lebih transparan, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan sekolah agar dana pendidikan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: Efektivitas, Anggaran Pendidikan, Manajemen Keuangan, Dinas Pendidikan.

Abstract: This study analyzes the effectiveness of the education budget in the Nabire Regency Education Office using a mixed methods approach. Quantitative methods are used to measure budget effectiveness, while qualitative methods analyze realization and inhibiting factors. Data were collected through observation, interviews, and documentation with five key informants.

The results of the study indicate that the realization of the education budget is quite good, but its effectiveness is still below 100%, indicating challenges in the utilization of funds. The main obstacles include complex bureaucracy, delays in disbursement of funds, and lack of understanding of budget procedures at the school level. The research recommendations include increasing employee capacity, implementing a more transparent budget information system, and better coordination between local governments and schools so that education funds are more effective and on target.

Keywords: Effectiveness, Education Budget, Financial Management, Education Office

PENDAHULUAN

Anggaran pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan di suatu daerah. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Namun, efektivitas realisasi anggaran pendidikan masih menjadi

tantangan, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti Kabupaten Nabire.

Dalam konteks Kabupaten Nabire, alokasi anggaran pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, tetapi belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, pada tahun 2024 pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 385,6 miliar, tetapi realisasi anggarannya hanya

mencapai Rp. 239,2 miliar atau sekitar 62,04%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam penyerapan anggaran yang dapat memengaruhi efektivitas program pendidikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas anggaran pendidikan dalam berbagai konteks. Misalnya, studi oleh (Putri Dharma et al., 2024) menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan di Kota Semarang mencapai rata-rata 97,82% dalam lima tahun terakhir. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas anggaran sangat bergantung pada sistem manajemen keuangan yang baik. Namun, penelitian tentang efektivitas anggaran pendidikan di daerah tertinggal dan terpencil seperti Kabupaten Nabire masih terbatas, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitas anggaran di daerah tersebut.

Penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang efektivitas anggaran pendidikan dengan mengkaji realisasi anggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya dalam konteks daerah terpencil. Pendekatan mixed methods yang digunakan dalam penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dalam menganalisis efektivitas anggaran secara lebih komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire dalam meningkatkan pengelolaan anggaran pendidikan. Dengan memahami kendala dalam realisasi anggaran, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan desentralisasi fiskal di sektor pendidikan, khususnya untuk daerah dengan karakteristik geografis dan sosial yang menantang seperti Nabire.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis realisasi anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire.
2. Menilai efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan rasio efektivitas anggaran pendidikan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran

pendidikan di Kabupaten Nabire dan daerah lainnya yang memiliki tantangan serupa.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas Anggaran Pendidikan

Efektivitas anggaran pendidikan merujuk pada sejauh mana alokasi dan penggunaan dana pendidikan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan (Mardiasmo et al., 2008). Dalam konteks manajemen keuangan publik, efektivitas anggaran diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap anggaran yang telah direncanakan serta dampaknya terhadap output dan outcome pendidikan (Gulo et al., 2024).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tata kelola keuangan, sistem birokrasi, serta kapasitas sumber daya manusia (Abduh, 2018). Di beberapa daerah, kendala seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta intervensi politik dalam pengalokasian anggaran menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penggunaan dana pendidikan (Kartika & Arief, 2021).

Menurut teori Value for Money (VfM), efektivitas anggaran pendidikan dapat diukur berdasarkan tiga prinsip utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Ekonomi mengacu pada sejauh mana dana digunakan dengan biaya minimal untuk mendapatkan input yang berkualitas, efisiensi berkaitan dengan sejauh mana input dapat menghasilkan output yang maksimal, dan efektivitas menunjukkan apakah output yang dihasilkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Anggaran Pendidikan

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi efektivitas anggaran pendidikan di tingkat daerah meliputi:

1. Tata Kelola Keuangan dan Birokrasi

Manajemen keuangan yang baik merupakan kunci utama efektivitas anggaran (Kasmir, 2018). Studi oleh (Medea et al., 2024) menemukan bahwa sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel berkontribusi terhadap efektivitas penggunaan anggaran di sektor pendidikan. Namun, birokrasi yang kompleks seringkali memperlambat proses pencairan dana,

seperti yang terjadi di beberapa daerah terpencil, termasuk Nabire.

2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi pengelola anggaran di tingkat pemerintah daerah dan sekolah sangat menentukan efektivitas realisasi anggaran (Paembonan et al., 2024). Kurangnya pemahaman terkait prosedur keuangan dan sistem pelaporan sering kali menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana.

3. Stabilitas Kebijakan Pemerintah

Ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah pusat dalam alokasi dana pendidikan dapat memengaruhi efektivitas anggaran di daerah (Roji, 2010). Beberapa kebijakan anggaran sering kali mengalami perubahan yang berdampak pada perencanaan dan implementasi program pendidikan di tingkat daerah.

4. Partisipasi Masyarakat dan Sekolah

Penelitian oleh (Sarjono & Nurfuadi, 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Sekolah yang memiliki peran aktif dalam mengusulkan kebutuhan anggaran cenderung memiliki realisasi anggaran yang lebih efektif.

Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji efektivitas anggaran pendidikan di berbagai daerah dengan berbagai metode. (Aulia & Nugraheni, 2022) menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas anggaran pendidikan di Kota Semarang melalui rasio efektivitas, dengan hasil menunjukkan efektivitas anggaran sebesar 97,82%. Sementara itu, studi oleh (Purba et al., 2024) menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti hambatan dalam efektivitas anggaran pendidikan di daerah terpencil dan menemukan bahwa faktor birokrasi dan keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam implementasi anggaran pendidikan.

Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya dengan menggabungkan pendekatan mixed methods untuk mengukur efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat realisasi anggaran. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam konteks efektivitas anggaran pendidikan di daerah terpencil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yakni kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire (Sugiyono, 2017; Yusuf, 2017). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran berdasarkan rasio efektivitas keuangan (Kasmir, 2018), sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat realisasi anggaran pendidikan melalui wawancara mendalam dengan informan terkait (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi anggaran pendidikan di wilayah tersebut. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan yaitu dari bulan November 2024 hingga bulan Januari 2025, dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi (Sekaran & Bougie, 2017). Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Sumber data dalam penelitian kualitatifnya ditentukan secara purposive sampling, dengan lima informan utama yang dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan, yaitu sekretaris dinas, kasubag perencanaan, kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, dan bendahara gaji.

Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2024, yang kemudian dianalisis menggunakan rasio efektivitas anggaran. Efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang telah ditetapkan, dengan kategori efektivitas berdasarkan standar dari (Kasmir, 2018). Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif (Miles et al., 2014), yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana anggaran

pendidikan di Kabupaten Nabire telah dikelola secara efektif serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam realisasinya. Hasil analisis ini nantinya akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran pendidikan di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua. Dinas ini memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan anggaran pendidikan guna memastikan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mencakup beberapa bidang utama, seperti Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, serta Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Kabupaten Nabire memiliki karakteristik geografis yang menantang, dengan banyak wilayah terpencil yang masih menghadapi kendala dalam akses pendidikan. Tantangan geografis ini memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan, terutama dalam hal distribusi dana ke sekolah-sekolah yang berada di daerah pedalaman. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendidikan dan sumber daya manusia yang masih terbatas juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas realisasi anggaran.

Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menerima pagu anggaran pendidikan sebesar Rp. 385,6 miliar, dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 239,2 miliar atau sekitar 62,04% dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program, termasuk gaji dan tunjangan guru, operasional sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, serta pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik. Meskipun realisasi anggaran menunjukkan angka yang cukup tinggi, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penggunaan dana, terutama dalam proses pencairan dan distribusi anggaran ke sekolah-sekolah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan secara memadai, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterlambatan pencairan dana, ketidakmerataan alokasi anggaran di berbagai sekolah, serta birokrasi yang kompleks dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi anggaran, yang berdampak pada efektivitas

penggunaan dana pendidikan di Kabupaten Nabire.

Gambaran umum ini menjadi dasar dalam menganalisis lebih lanjut efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu diperbaiki agar anggaran dapat digunakan secara lebih optimal dan tepat sasaran.

Hasil Analisis Kuantitatif

Penelitian ini mengukur efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire menggunakan rasio efektivitas anggaran, yang dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran. Menurut (Kasmir, 2018), kategori efektivitas anggaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $>100\%$ = Tidak Efektif (terjadi pemborosan anggaran)
- $=100\%$ = Efektif Seimbang
- $<100\%$ = Efektif (pengelolaan anggaran cukup baik, meskipun masih dapat ditingkatkan)

Perhitungan efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire tahun 2024 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \right) \times 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, berikut adalah perhitungan efektivitas anggaran berdasarkan masing-masing sumber dana:

Efektivitas Total Anggaran Pendidikan

Pagu Anggaran = Rp. 385.600.900.605

Realisasi Anggaran = Rp. 239.259.306.747

$$\text{Efektivitas} = \left(\frac{239.259.306.747}{385.600.900.605} \right) \times 100\%$$

$$= 62,04\%$$

Interpretasi: Nilai efektivitas sebesar 62,04% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tergolong efektif, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam optimalisasi pemanfaatan dana.

Efektivitas Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Berikut adalah efektivitas anggaran berdasarkan sumber dana utama di Kabupaten Nabire:

Tabel 1. Efektivitas Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kategori
DAU (Gaji & Tunjangan)	120.846.070.345	115.175.834.551	95,30%	Efektif
DAU Earmarked (PPPK Operasional Pendidikan)	& 92.905.921.000	78.481.953.696	99,99%	Efektif
OTSUS (Dana Otonomi Khusus)	26.221.583.500	25.116.581.500	95,78%	Efektif
DAK Fisik (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK)	23.050.939.000	20.480.937.000	85,21%	Efektif
DAK Non-Fisik (BOS, TPG, TAMSIL, TKG)	122.576.386.760	121.937.956.160	66,07%	Efektif
TOTAL	385.600.900.605	239.259.306.747	62,04%	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2025.

Interpretasi Hasil Analisis Kuantitatif

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh kategori anggaran memiliki efektivitas di bawah 100%, yang mengindikasikan bahwa anggaran pendidikan telah dikelola dengan cukup baik tanpa terjadi pemborosan yang berlebihan. Namun, angka efektivitas yang masih relatif rendah pada total anggaran (62,04%) menunjukkan bahwa belum semua anggaran dapat terserap secara optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain:

- Birokrasi yang kompleks, yang menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana.
- Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, terutama dalam proyek pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola anggaran di tingkat sekolah.
- Kurangnya pemahaman di tingkat sekolah tentang prosedur anggaran, yang menghambat pencairan dana BOS dan DAK Non-Fisik.

Hasil ini menegaskan perlunya peningkatan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar efektivitas anggaran dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada bagian berikutnya, analisis kualitatif akan membahas lebih lanjut faktor-faktor yang menghambat efektivitas anggaran serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Hasil Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima informan utama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, yakni Sekretaris Dinas Pendidikan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Gaji.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif menurut (Miles et al., 2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kendala dalam Realisasi Anggaran Pendidikan

Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire:

- Birokrasi yang Kompleks dan Proses Pencairan Dana yang Lambat

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah proses birokrasi yang panjang dalam pencairan dana pendidikan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengadaan sarana-prasarana.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Bapak Viktor Tebay, S.Pd, pencairan dana sering kali memerlukan proses administrasi yang panjang, sehingga banyak program pendidikan yang tertunda.

"Proses pencairan dana membutuhkan banyak tahapan administratif yang cukup panjang. Selain itu, terkadang perubahan kebijakan dari pusat membuat pencairan menjadi lebih lambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan implementasi program pendidikan." (Hasil Wawancara dengan informan, Desember 2024)

Kendala ini juga diperkuat oleh pernyataan Kasubag Keuangan, Ibu Endang Patari, S.Th, M.M, yang menambahkan bahwa keterlambatan pencairan dana dapat menyebabkan beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya.

"Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sering kali mengalami keterlambatan pencairan. Beberapa sekolah mengandalkan dana ini untuk operasional harian, sehingga keterlambatan pencairan berdampak besar pada proses belajar-mengajar." (Hasil wawancara dengan informan, Desember 2024)

b. Kurangnya Pemahaman tentang Prosedur Anggaran di Tingkat Sekolah

Selain masalah birokrasi, kurangnya pemahaman kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang mekanisme pencairan dan penggunaan dana pendidikan juga menjadi hambatan utama.

Menurut Kasubag Perencanaan, Bapak Muhammad Saiful, S.Pd, masih banyak sekolah yang belum memahami prosedur pengajuan dana dengan benar.

"Beberapa sekolah masih mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan dan pengajuan pencairan dana. Kesalahan administrasi ini sering kali membuat dana yang seharusnya cair tepat waktu menjadi tertunda." (Hasil wawancara dengan informan, Januari 2025)

Bendahara Pengeluaran, Bapak Robert Mangape, S.Hut, juga mengonfirmasi bahwa banyak sekolah kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

"Masih banyak sekolah yang kurang memahami mekanisme penyusunan laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan yang lengkap dan akurat menjadi syarat utama pencairan dana berikutnya." (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2025)

c. Intervensi Politik dalam Pengalokasian Anggaran

Hasil wawancara juga mengungkap bahwa dalam beberapa kasus, alokasi anggaran pendidikan dipengaruhi oleh faktor politik, bukan berdasarkan kebutuhan prioritas pendidikan. Menurut Bendahara Gaji, Bapak Haryanto Todinglayuk, S.Sos, ada beberapa pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Kadang ada kebijakan mendadak dari pemangku kepentingan yang menyebabkan perubahan alokasi anggaran. Ini sering kali tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan sekolah." (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2025)

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Anggaran

Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga ahli yang mengelola anggaran pendidikan. Menurut Kasubag Perencanaan, Bapak Muhammad Saiful, S.Pd, keterbatasan tenaga ahli menyebabkan pengelolaan anggaran menjadi kurang optimal.

"Kami masih kekurangan tenaga yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini membuat pelaksanaan anggaran menjadi kurang efektif." (Hasil wawancara dengan Informan, Januari 2025)

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Anggaran Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire, yaitu

1. Menyederhanakan proses birokrasi dalam pencairan dana untuk mempercepat realisasi anggaran.
2. Memberikan pelatihan intensif kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah mengenai prosedur pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.
3. Meningkatkan transparansi dalam pengalokasian anggaran, sehingga anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan pendidikan yang riil di lapangan, bukan berdasarkan kepentingan politik.
4. Menambah tenaga ahli di bidang keuangan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran di tingkat dinas maupun sekolah.
5. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan berbasis digital, sehingga proses pelaporan dan pencairan dana dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses birokrasi pencairan dana, pemahaman administrasi di tingkat sekolah, intervensi politik dalam alokasi anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Untuk meningkatkan efektivitas anggaran, diperlukan perbaikan dalam sistem birokrasi, pelatihan bagi tenaga pendidik, transparansi dalam alokasi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran pendidikan sehingga dapat berdampak lebih besar pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Nabire.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire masih berada di bawah 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 62,04% dari total pagu anggaran

tahun 2024. Meskipun masih berada dalam kategori efektif, angka ini mengindikasikan bahwa belum seluruh anggaran dapat terserap secara optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas anggaran pendidikan di daerah sering kali terkendala oleh birokrasi yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan dalam pencairan dana (Aulia & Nugraheni, 2022; Purba et al., 2024)

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa birokrasi yang panjang dalam pencairan dana menjadi faktor dominan yang menghambat realisasi anggaran. Proses administrasi yang berbelit menyebabkan keterlambatan implementasi berbagai program pendidikan. Selain itu, kurangnya pemahaman kepala sekolah dan tenaga administrasi di tingkat sekolah mengenai prosedur pengelolaan anggaran juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas penggunaan dana. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, misalnya, sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana BOS dan DAK Non-Fisik. Hal ini konsisten dengan penelitian (Retnosari et al., 2022; Setiawati et al., 2025) yang menyoroti bahwa kapasitas manajemen keuangan di tingkat sekolah sangat mempengaruhi efektivitas realisasi anggaran pendidikan.

Selain kendala administratif, penelitian ini juga menemukan adanya intervensi politik dalam pengalokasian anggaran pendidikan. Beberapa keputusan terkait distribusi dana pendidikan tidak sepenuhnya berbasis pada kebutuhan sekolah, melainkan dipengaruhi oleh kebijakan pemangku kepentingan yang terkadang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini berisiko menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi dana dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang lebih merata.

Namun, meskipun terdapat berbagai kendala, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa aspek positif dalam efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire. Salah satunya adalah efektivitas anggaran dalam kategori gaji dan tunjangan guru, yang mencapai lebih dari 95%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan tenaga pendidik telah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaan dana operasional sekolah dan pengadaan sarana prasarana.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire. Perbaikan sistem birokrasi dalam pencairan dana, peningkatan kapasitas tenaga administrasi di sekolah, serta transparansi dalam pengalokasian anggaran

menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam sistem informasi keuangan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan anggaran pendidikan. Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan baik, efektivitas penggunaan anggaran di Kabupaten Nabire dapat meningkat, sehingga berdampak lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire dengan pendekatan mixed methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai 62,04% dari total pagu anggaran, yang mengindikasikan bahwa meskipun tergolong efektif, masih terdapat kendala dalam optimalisasi penggunaan dana. Faktor utama yang menghambat efektivitas anggaran meliputi birokrasi yang kompleks, keterlambatan pencairan dana, kurangnya pemahaman administrasi di tingkat sekolah, intervensi politik dalam alokasi anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Di sisi lain, efektivitas dalam pembayaran gaji dan tunjangan guru menunjukkan capaian yang baik, tetapi pengelolaan dana operasional dan pengadaan sarana pendidikan masih memerlukan perbaikan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan kapasitas tenaga administrasi sekolah dalam manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem keuangan pendidikan guna meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Selain itu, kebijakan pengalokasian dana sebaiknya berbasis kebutuhan faktual di sekolah, bukan sekadar pertimbangan politis. Jika rekomendasi ini diterapkan, maka efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Nabire dapat lebih meningkat, berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam cakupan wilayah dan jumlah informan yang terbatas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di seluruh satuan pendidikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan lebih banyak sekolah sebagai responden, serta mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti pengaruh kebijakan pendidikan nasional terhadap efektivitas anggaran di daerah. Studi lanjutan juga dapat menggunakan metode longitudinal untuk melihat tren efektivitas anggaran pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. H. (2018). Analisis Perencanaan Anggaran Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan pada Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 367–388. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/92/pdf/343>
- Aulia, E. N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 413–420. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>
- Gulo, E., Telaumbanua, A., Waruwu, S., Batee, M. M., & Kakisina, S. M. (2024). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Operasional Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Nias. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(1), 227–232. <https://doi.org/10.57093/metansi.v7i1.272>
- Kartika, R. S., & Arief, S. (2021). Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 105–114. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141>
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Mandatory Spending*. Webpage. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Value for Money*. Webpage. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm>
- Mardiasmo, D., Barnes, P., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges. *Proceedings Contemporary Issues in Public Management: The Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM XII)*, 1–36. <https://eprints.qut.edu.au/15321/1/15321.pdf>
- Medea, F., Sabandar, S. Y., & Badawi, R. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(1), 45–51. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/226>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 02(2), 1–6. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Purba, A. W. A., Situmeang, N. T. F. N., Fitriani, D., Febry, K., Sihombing, F., & Siregar, Y. R. (2024). Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah. *Nizhamiyah*, 14(1), 64. <https://doi.org/10.30821/niz.v14i1.3239>
- Putri Darma, S., Haliza, N., Aulia Br Ginting, D., & Kemala, P. (2024). Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2506–2512. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101>
- Retnosari, M. C., Suryawati, C., & Harto, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231–240. <https://doi.org/10.14710/jmki.10.3.2022.231-240>
- Roji, M. (2010). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Demokrasi*, 09(01), 1–16.
- Sarjono, & Nurfuadi. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Perspektif Teori Penganggaran Partisipatif. *Linuhung: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 1(2), 74–83. <https://doi.org/10.52496/linuhung.v1i2.219>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Method for Business* (6th ed.). Salemba Empat.
- Setiawati, A., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). ANALISIS KOMPETENSI PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM OPTIMALISASI INDIKATOR KINERJA

PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI. *Syntax Literate: Jurnal
Ilmiah Indonesia*, 10(1), 799–805.
[https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/
syntax-literate/article/view/56123/11180](https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/56123/11180)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Yusuf, A. M. (2017). *METODE PENELITIAN: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Cetakan ke). Kencana.